



Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dukuhsari, Kabupaten Sidoarjo

Ineke Desi Natalia¹⁾, Hendra Sukmana²⁾

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

inekedesi2512@gmail.com¹⁾
hendrasukmana@umsida.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis suatu keadaan atau fenomena dengan memberikan penjelasan melalui deskripsi yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan narasumber atau informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian ini menggunakan empat indikator efektivitas program yang diambil dari Budiani (2018), yang pertama: ketepatan sasaran program, bahwa dalam indikator ketepatan sasaran program masih dikatakan belum sesuai karena tidak adanya mekanisme verifikasi awal yang terstruktur untuk memastikan seluruh warga yang memenuhi kriteria. Kedua, indikator sosialisasi program, bahwa pada indikator sosialisasi program sudah sesuai dan tidak ditemukan penyimpangan. Ketiga, indikator Kesesuaian tujuan program, bahwa PKTD Dukuhsari belum sepenuhnya sesuai, dikarenakan, meskipun tujuan PKTD di Desa Dukuhsari jangka pendek terpenuhi, ketercapaian tujuan jangka panjang masih lemah. Keempat, Pemantauan dan Evaluasi Program masih dikatakan belum sesuai. Praktik pemantauan di Desa Dukuhsari masih banyak berfokus pada hal teknis dan administratif.

Kata kunci: Efektifitas; PKTD; Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This research is a qualitative descriptive study that aims to analyze a situation or phenomenon by providing an explanation through descriptions that are in accordance with the facts that occur in the field. The technique of determining informants in this study uses purposive sampling, namely the technique of selecting sources or informants who are selected based on certain considerations. The results of this study use four indicators of program effectiveness taken from Budiani (2018), the first: the accuracy of program targets, that in the indicator of the accuracy of program targets it is still said to be inappropriate because there is no structured initial verification mechanism to ensure that all residents meet the criteria. Second, the indicator of program socialization, that in the indicator of program socialization it is appropriate and no deviations are found. Third, the indicator of the suitability of program objectives, that the Dukuhsari PKTD is not fully appropriate, because, although the short-term objectives of the PKTD in Dukuhsari Village are met, the achievement of long-term objectives is still weak. Fourth, Program Monitoring and Evaluation is still said to be inappropriate. Monitoring practices in Dukuhsari Village still focus a lot on technical and administrative matters.

Keyword: Effectiveness; PKTD; Community Empowerment

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia, dengan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi otonomi luas bagi desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan tradisi. Kebijakan ini membuka peluang bagi desa untuk mandiri mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan daya beli. Namun, optimalisasi pembangunan desa masih menghadapi tantangan, salah satunya pola ketergantungan masyarakat terhadap bantuan langsung pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (Budiasa et al., 2019). Ketergantungan berlebih pada bantuan pemerintah menghambat kemandirian rumah tangga pedesaan. Akses modal mata pencaharian (pendapatan, keterampilan, aset) lebih penting mengurangi kemiskinan daripada pemecahan sumber pendapatan saja (Onyeyirichi & Deepika, 2025).

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai bentuk konkret dari pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. PKTD merupakan memberdayakan masyarakat desa miskin secara produktif dengan sumber daya lokal, mirip dengan cash-for-work (CfW) programmes yang terbukti mendukung kohesi sosial dan pengurangan kemiskinan melalui pekerjaan sementara (Viollaz et al., 2020). Tujuannya adalah memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Endi & Widhiasthini, 2021).

Pelaksanaan PKTD didukung oleh landasan hukum yang kuat. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan berbasis padat karya tunai. Selain itu, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 secara eksplisit memprioritaskan alokasi dana untuk membiayai PKTD (Permendes, 2017). Kerangka regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memosisikan PKTD sebagai program strategis pemberdayaan masyarakat desa. Program ini tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi penganggur dan setengah penganggur, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, dan semangat gotong royong (Jazuli, 2021). Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan PKTD, masyarakat desa, khususnya kelompok rentan, memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka. Sejalan dengan itu, dana yang diterima masyarakat desa dapat dipandang sebagai pembentukan modal yang mampu meningkatkan produksi barang pada periode berikutnya (Marhaeni et al., 2024).

Pelaksanaan PKTD telah dilakukan di seluruh desa di Indonesia, termasuk di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Program ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahap pelaksanaannya. Pada tahun 2024, tercatat peningkatan pendapatan rata-rata peserta sebesar 38% menjadi Rp1,65 juta per bulan, tingkat pengangguran menurun hingga 5,8%, dan infrastruktur desa mengalami perbaikan dengan selesainya pembangunan jalan sepanjang 2,5 km. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial juga berkurang sebesar 15% (Laporan KPMD Dukuhsari, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa PKTD berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Selain memperkuat ekonomi masyarakat, PKTD juga berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sosial desa. Evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan dana menjadi penting untuk melihat sejauh mana anggaran mendukung pencapaian tujuan program. Analisis laporan keuangan mencerminkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa.

Tabel 1
Anggaran Pembangunan Desa Dukuhsari

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Anggaran
1.	2022	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Rp.254.734.500,00
		2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	
		3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	
2.	2023	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Rp.672.865.300,00
		2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	
		3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	
		4. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	
3.	2024	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Rp.316.967.946,00
		2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	
		3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Dukuhsari (2025)

Berdasarkan data tabel, alokasi anggaran pembangunan desa tahun 2022–2024 mengalami fluktuasi. Anggaran meningkat signifikan pada tahun 2023 sebesar Rp672.865.300,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp254.734.500,00, kemudian menurun menjadi Rp316.967.946,00 pada tahun 2024. Jenis kegiatan yang dilakukan relatif konsisten, seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan, saluran desa, dan balai kemasyarakatan, dengan tambahan kegiatan pemetaan wilayah dan pembangunan makam pada tahun 2023. Data ini menunjukkan fokus berkelanjutan terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu turut mengkaji efektivitas PKTD. Penelitian oleh Juliati Prihatini, Dimas Pratama, dan I Made Aldy Wijaya (2024) di Desa Dirgahayu menunjukkan bahwa proses pemberdayaan berhasil melalui pelatihan berbasis pertanian dan perikanan serta pendampingan intensif, meskipun seleksi lokasi dan sosialisasi belum optimal akibat rendahnya partisipasi selama pandemi (Prihatini et al., 2024). Penelitian Dandan Haryono dan Evi Silviana (2023) di Desa Cipakat menemukan bahwa dari empat tahap pemberdayaan, seleksi lokasi dan sosialisasi belum berjalan baik karena minimnya musyawarah dan kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat (Haryono et al., 2022). Penelitian oleh Muhammad Yusril Amar Setiawan dan Suci Megawati (2022) di Desa Pekarungan menunjukkan bahwa PKTD berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat, budaya gotong royong, dan penciptaan lapangan kerja sementara, meskipun aspek efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan belum terpenuhi secara optimal. (Setiawan & Megawati, 2022).

Berdasarkan observasi lapangan, terdapat beberapa masalah dalam efektivitas PKTD di Desa Dukuhsari. Pertama, kurangnya kejelasan dalam pengelolaan dan optimalisasi seleksi peserta program yang berpotensi menghambat partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Kedua, tantangan dalam aspek keberlanjutan setelah proyek fisik selesai, karena belum ada mekanisme untuk menjaga peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Ketiga, lemahnya kegiatan pemantauan dan evaluasi pascaprogram yang menyebabkan kendala lapangan tidak terdeteksi dan mengurangi peluang perbaikan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (2018) dalam Melati (2021), yang mencakup empat variabel utama: (1) Ketepatan Sasaran Program, (2) Sosialisasi Program, (3) Kesesuaian Tujuan Program, dan (4) Pemantauan Program (Melati & Zulkarnaini, 2021). Keempat variabel ini menjadi kerangka analisis utama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan PKTD di Desa Dukuhsari berjalan efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini tidak hanya menggunakan teori efektivitas program dari Budiani (2018) sebagai kerangka analisis, tetapi juga menguji relevansi indikatornya dalam konteks PKTD di tingkat desa. Hasil observasi awal menunjukkan adanya aspek penting seperti keberlanjutan manfaat program setelah proyek selesai yang belum tercakup secara eksplisit dalam empat indikator tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya celah teoritis yang perlu diperluas agar teori efektivitas program lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memberikan pengayaan pada indikator efektivitas program melalui penyesuaian konteks penerapan teori, sehingga memperluas pemahaman akademik mengenai efektivitas program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan empat indikator efektivitas program menurut Budiani (2018).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena secara mendalam dan sistematis agar mudah dipahami. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keadaan berdasarkan fakta di lapangan dengan penulis sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data (Anak, 2008). Lokasi penelitian berada di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang dipilih karena terdapat permasalahan terkait efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam pemberdayaan masyarakat. Fokus penelitian mengacu pada empat indikator efektivitas program dari Budiani (2018), yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, kesesuaian tujuan, serta pemantauan dan evaluasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013). sebanyak 4 orang, terdiri dari Kepala Desa, dua perangkat desa yang terlibat dalam pelaksanaan PKTD, dan satu penerima manfaat. Kriteria informan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penerimaan manfaat program.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2008). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta menggabungkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan efektivitas PKTD dalam pemberdayaan masyarakat Desa Dukuhsari secara sistematis dan mendalam berdasarkan data kualitatif yang valid dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program dari Budiani (2018) sebagai dasar analisis untuk menilai sejauh mana Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) berjalan efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Teori ini mengukur efektivitas melalui empat indikator utama: (1) ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana peserta sesuai dengan kriteria program; (2) sosialisasi program, yakni efektivitas penyampaian informasi dan pemahaman tujuan; (3) kesesuaian tujuan, yaitu ketercapaian hasil sesuai sasaran jangka pendek dan panjang; serta (4) pemantauan dan

evaluasi, yaitu tingkat pengawasan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan manfaat.

Keempat indikator ini saling terhubung secara logis: ketepatan sasaran menjadi dasar agar manfaat diterima kelompok prioritas; sosialisasi menjamin partisipasi masyarakat; kesesuaian tujuan menunjukkan capaian nyata; dan pemantauan-evaluasi memastikan manfaat berkelanjutan. Kerangka tersebut menjadi dasar analisis atas temuan lapangan di Desa Dukuhsari.

A. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran merupakan indikator penting efektivitas program menurut Budiani (2018), karena menunjukkan sejauh mana penerima manfaat sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks PKTD di Desa Dukuhsari, proses penentuan peserta dilakukan secara sederhana dan informal. Perangkat desa mengungkapkan bahwa seleksi tenaga kerja dilakukan berdasarkan lokasi dan jenis pekerjaan tanpa prosedur verifikasi yang ketat. Bapak Kunto selaku kaur perencanaan menyatakan:

“Sebenarnya nggak ada prosedur formal yang rumit. Kalau ada pembangunan di suatu dusun, otomatis warga dusun tersebut sendiri yang dilibatkan jadi pekerja program PKTD. Kalau proyeknya pembangunan infrastruktur seperti bangunan, pemilihannya dilihat dari kemampuan soalnya nggak semua orang bisa jadi tukang atau kuli bangunan. Tapi kalau kegiatannya cuma normalisasi saluran irigasi, ya kriterianya nggak ketat. Siapa saja yang mau ikut bisa, karena sifatnya seperti bersih-bersih saluran air.” (Wawancara, 7 Agustus 2025)

Lebih lanjut, hal ini didukung oleh pernyataan sekretaris desa yang menjelaskan bahwa tidak ada mekanisme verifikasi formal yang dilakukan sebelum program berjalan. Sekretaris desa mengatakan:

“Kalau verifikasi khusus sih nggak ada, Mbak. Biasanya kita langsung milih warga yang kelihatan masuk kategori rentan miskin, jadi ya lebih gampang dan cepat juga prosesnya. Kadang juga diprioritaskan yang rumahnya dekat sama lokasi proyek. Terus, soal administrasi kayak fotokopi KTP itu biasanya baru diminta setelah pekerjaannya selesai, buat kelengkapan laporan aja.” (Wawancara, 7 Agustus 2025)

Mekanisme seperti ini memang mempercepat proses perekrutan, tetapi mengurangi akurasi dalam menjangkau kelompok paling membutuhkan. Seleksi yang bersifat praktis dan berbasis jarak serta kemudahan koordinasi berisiko mengabaikan prinsip pemerataan dan ketepatan sasaran.

Tabel 2
Jenis Kegiatan PKTD Desa Dukuhsari

Tahun	Proyek	Jumlah tenaga kerja (Orang)
2023	Pembangunan jalan dusun	50
	Pembangunan posyandu	50
	Pembangunan saluran drainase	12
2024	Pembangunan makam baru dusun dukuhsari 2	30
	Pembangunan drainase	12
	Pembangunan drainase	10
	Normalisasi saluran irigasi	10
	Normalisasi sungai golongdoro	10
Total		174

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Dukuhsari

Data tersebut memperlihatkan bahwa PKTD telah membuka kesempatan kerja sementara bagi cukup banyak warga desa. Namun demikian, besarnya jumlah tenaga kerja yang terlibat belum secara otomatis menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan mekanisme rekrutmen tenaga kerja masih dilakukan secara informal melalui perangkat desa maupun ketua RT/RW, sehingga belum ada sistem seleksi yang berbasis pada data resmi, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Budiani (2018), kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi indikator ketepatan sasaran. Budiani menegaskan pentingnya proses pendataan, penetapan kriteria, dan verifikasi yang jelas agar program benar-benar menjangkau kelompok sasaran. Ketiadaan mekanisme verifikasi terstruktur menunjukkan risiko tidak meratanya akses dan peluang bagi warga miskin yang seharusnya menjadi prioritas.

Faktor penyebab utama kondisi ini adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola data sosial ekonomi serta minimnya pemanfaatan basis data resmi dalam rekrutmen. Pendekatan informal dianggap lebih efisien karena mempermudah koordinasi, tetapi berimplikasi serius terhadap efektivitas program. Potensi terjadinya kesalahan sasaran tinggi: warga miskin yang layak bisa terlewatkan, sementara peserta yang tidak terlalu membutuhkan justru terlibat. Hal ini dapat menurunkan legitimasi program dan menghambat tujuan utama PKTD sebagai sarana pemberdayaan ekonomi..

Secara kebijakan, situasi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas aparat desa dalam pendataan sosial serta penggunaan data kemiskinan terverifikasi sebagai dasar perencanaan. Pemerintah desa perlu menyusun mekanisme seleksi yang lebih transparan dan partisipatif, misalnya melalui musyawarah desa yang melibatkan perwakilan masyarakat dalam verifikasi calon peserta. Dengan langkah ini, program tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkeadilan.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam penelitian terdahulu berjudul “Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru”, yang mengungkapkan bahwa tahapan pemilihan lokasi dan seleksi peserta belum terlaksana secara akurat sehingga mempengaruhi capaian efektivitas program pemberdayaan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan ketidaktepatan sasaran bukan hanya terjadi di Desa Dukuhsari, melainkan merupakan tantangan struktural yang umum dalam implementasi PKTD di berbagai wilayah.

B. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan salah satu indikator penting dalam kerangka efektivitas pelaksanaan suatu program, sebagaimana dijelaskan oleh Budiani (2018). Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara menginformasikan tujuan, mekanisme, dan prosedur sehingga masyarakat/peserta memahami dan dapat memanfaatkan program. Sosialisasi yang baik tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga harus membangun pemahaman yang mendalam mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program.

Di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan sosialisasi Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dilakukan melalui mekanisme forum resmi desa seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan rapat tingkat RT/RW mulai awal adanya program hingga saat ini. Sosialisasi melalui forum tatap muka memungkinkan adanya interaksi dua arah sehingga warga dapat bertanya dan memberikan masukan secara langsung, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap program. Sekretaris desa menyatakan:

“Jadi waktu pertama kali ada PKTD itu kita kasih tahu ke warga lewat forum MUSRENBANG, Mbak. Sampai sekarang pun kalau ada pembangunan yang melibatkan PKTD biasanya tetap diumumkan lewat MUSRENBANG atau rapat di tingkat RT/RW. Di forum-forum itu kita jelasin secara rinci, mulai dari rencana pembangunan yang bakal dijalankan sampai peluang kerja apa saja yang bisa diikuti warga. Jadi biar semua orang paham, informasi selalu dibuka di rapat supaya nggak ada yang ketinggalan.” (Wawancara tanggal 07 Agustus 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga Desa Dukuhsari memahami PKTD sebagai program yang memberikan kesempatan memperoleh penghasilan tambahan.

Pemahaman ini terbentuk karena adanya sosialisasi rutin dan konsisten di forum-forum desa. Hal ini dibuktikan dengan gambar dibawah ini.

Gambar 1
Pelaksanaan MUSRENBANG di Desa Dukuhsari



Dengan adanya forum seperti Musrenbangdes, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan mengenai perencanaan program. Oleh karena itu, keberadaan forum resmi ini memperkuat efektivitas PKTD pada aspek sosialisasi, meskipun dalam praktiknya sebagian besar warga tetap lebih banyak memperoleh informasi melalui jalur informal di tingkat RT/RW.

Warga yang aktif mengikuti kegiatan desa memperoleh informasi langsung mengenai tujuan dan mekanisme program. Seorang warga mengungkapkan:

“Saya biasanya ikut rapat RW kalau diajak sama Pak RT, jadi bisa tahu langsung kalau ada proyek dari desa. Dari situ juga sekalian dikasih tahu peluang kerja yang bisa diikuti warga. Informasinya biasanya disampaikan langsung sama ketua RW atau perangkat desa, jadi jelas dan gampang dipahami. Makanya saya jadi ngerti tujuan program ini, soalnya penjelasannya memang langsung dibicarakan di rapat.” (Wawancara tanggal 10 agustus 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil menjangkau dan memberikan informasi kepada masyarakat sasaran. Jika dikaitkan dengan teori Budiani (2018), pelaksanaan sosialisasi sudah sesuai dengan indikator efektivitas program, karena dilakukan secara terbuka, rutin, dan konsisten melalui forum resmi desa. Meskipun metode yang digunakan masih terbatas pada tatap muka, penyebaran informasi secara sosial tetap membuat akses relatif merata.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi PKTD sangat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan masyarakat dalam mengikuti forum-forum desa. Masyarakat yang jarang hadir berpotensi tertinggal informasi, sehingga partisipasi mereka dalam program menjadi rendah. Terbatasnya metode sosialisasi juga menjadi catatan, karena belum memanfaatkan media alternatif seperti papan informasi digital, media sosial, atau selebaran yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya pemerintah desa memperluas strategi sosialisasi dengan pendekatan multikanal agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak aktif dalam forum desa. Langkah ini akan meningkatkan inklusivitas dan memastikan semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dandan Haryono dan Evi Silviana (2023) di Desa Cipakat yang menunjukkan efektivitas sosialisasi melalui forum tatap muka dalam meningkatkan pemahaman warga aktif terhadap program. Namun, di kedua desa, efektivitas masih bersifat parsial karena belum menyentuh masyarakat yang kurang aktif. Oleh karena itu, meskipun sosialisasi PKTD di Desa Dukuhsari dapat dikatakan cukup efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mendukung tujuan pemberdayaan, strategi komunikasi publik tetap perlu ditingkatkan agar dampaknya lebih merata.

C. Kesesuaian Tujuan Program

Teori efektivitas program menurut Budiani (2018) kesesuaian tujuan program merupakan salah satu indikator utama efektivitas yang menilai sejauh mana hasil yang dicapai selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat desa, terutama kelompok miskin dan marginal, melalui kegiatan produktif yang memanfaatkan sumber daya lokal, tenaga kerja desa, dan teknologi sederhana untuk menambah pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Dukuhsari, diketahui bahwa tujuan jangka pendek PKTD relatif berhasil tercapai. Salah seorang kaur perencanaan desa menyampaikan:

“Alhamdulillah memang kerasa banget manfaatnya, soalnya warga yang ikut kerja bisa dapat tambahan penghasilan harian buat kebutuhan rumah tangga. Jadi selain ada kerjaan, mereka juga bisa langsung bawa pulang uang setiap hari. Terus, kebutuhan proyek kayak semen, pasir, atau bahan bangunan lain kebanyakan dibeli di warung sama toko yang ada di desa. Jadinya perputaran ekonomi di desa juga ikut jalan, nggak cuma orang yang kerja tapi pedagang lokal juga kena dampaknya.” (Wawancara tanggal 10 Agustus 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan fakta bahwa program berhasil memberikan dampak nyata berupa tambahan penghasilan harian kepada warga. Namun, ketika dilihat dari sisi tujuan jangka panjang, capaian program menunjukkan keterbatasan. Berdasarkan penuturan kaur perencanaan desa, peningkatan keterampilan atau kapasitas kerja warga masih sangat terbatas. Beliau mengatakan:

“Kalau soal peningkatan keterampilan kerja memang belum ada, Mbak, soalnya yang dipakai kebanyakan warga yang sudah punya keahlian jadi tukang bangunan. Jadi pas ada proyek langsung dikerahkan sesuai kemampuan masing-masing biar cepat selesai. Tapi kan nggak semua peserta itu tukang, ada juga warga yang sebenarnya nggak punya keahlian di bidang itu. Nah, buat yang bukan tukang ini memang belum dapat bekal tambahan setelah program selesai, jadi manfaatnya cuma terasa pas kerja aja.” (Wawancara tanggal 7 Agustus 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKTD di Desa Dukuhsari lebih banyak mengandalkan tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan, terutama di bidang konstruksi. Strategi ini efektif dalam memastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai standar, tetapi kurang memperhatikan pemberdayaan jangka panjang. Akibatnya, warga yang tidak memiliki keahlian belum mendapatkan manfaat berkelanjutan setelah program selesai. Dari sisi manfaat langsung, warga memperoleh penghasilan tambahan selama pelaksanaan program, yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi harian. Namun, tidak adanya pelatihan keterampilan baru atau pendampingan pascaprojek membatasi dampak program pada jangka pendek saja.

Berdasarkan fakta lapangan, apabila dikaitkan dengan teori efektivitas program menurut Budiani (2018), Budiani menegaskan bahwa indikator kesesuaian tujuan menilai keselarasan capaian dengan tujuan awal, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, kesesuaian tujuan PKTD di Desa Dukuhsari belum sepenuhnya terpenuhi, sebab belum mengintegrasikan komponen pemberdayaan jangka panjang seperti pelatihan kerja atau pendampingan lanjutan. Fokus utama pemerintah desa masih pada penyelesaian fisik dan penyaluran bantuan ekonomi cepat, bukan penciptaan kapasitas baru yang meningkatkan kemandirian warga.

Implikasinya, setelah proyek berakhir, masyarakat terutama yang tidak memiliki keterampilan konstruksi kembali pada kondisi awal tanpa bekal tambahan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pendukung seperti pelatihan kerja berbasis proyek, pengembangan kewirausahaan lokal, dan pemanfaatan hasil pembangunan pascaprojek agar tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Setiawan & Megawati (2022) di Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PKTD telah memenuhi indikator efektivitas dalam membuka lapangan kerja sementara, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menumbuhkan budaya gotong royong. Namun, seperti

di Desa Dukuhsari, aspek keberlanjutan belum tercapai karena lapangan kerja bersifat temporer dan tidak disertai pengembangan kapasitas atau pemeliharaan hasil pembangunan.

D. Pemantauan dan Evaluasi Program

Menurut Budiani (2018), indikator pemantauan dan evaluasi dalam efektivitas program mencakup kegiatan pengawasan dan penilaian setelah pelaksanaan program sebagai bentuk refleksi terhadap keberlanjutan dan dampaknya bagi peserta. Evaluasi pascaprogram juga memberi peluang untuk mengukur capaian, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan langkah perbaikan di masa depan. Artinya, kegiatan ini tidak hanya sebatas pengawasan teknis, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bersama untuk memastikan manfaat program berkelanjutan.

Di Desa Dukuhsari, pemantauan program PKTD dilakukan melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa, menjelaskan bahwa:

“Ada tim khusus dari desa yang namanya TPK, jadi tiap ada proyek mereka selalu datang ke lokasi. Hampir tiap hari TPK ini ngawasi langsung jalannya pekerjaan, biar sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Mereka juga mencatat siapa saja pekerja yang hadir lewat absensi harian, jadi lebih tertib. Selain itu, TPK juga memastikan pekerjaan yang dilakukan benar-benar sesuai rencana yang sudah disusun dari awal.” (Wawancara, 7 Agustus 2025)

Kegiatan pemantauan selanjutnya yaitu, dokumentasi hasil pemantauan biasanya disusun dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini dijelaskan langsung oleh sekretaris desa bagaimana prosesnya:

“Semua kegiatan proyek itu dicatat lengkap, mulai dari absensi pekerja setiap hari, dokumentasi foto di tiap tahap pekerjaan, sampai bukti-bukti lapangan. Semua data itu kemudian dikumpulkan jadi satu dalam SPJ, yang nantinya dipakai sebagai catatan administrasi dan dasar pertanggungjawaban. Jadi kalau soal laporan, memang sudah lengkap dan rapi. Cuma kalau urusan evaluasi hasil pembangunan atau kinerja pekerja, biasanya dibahasnya internal saja sama perangkat desa, belum sampai dibuka ke masyarakat luas.” (Wawancara, 7 Agustus 2025)

Hal ini didukung oleh wawancara dengan kaur perencanaan desa dimana proses evaluasi formal setelah proyek selesai belum pernah dilakukan secara terstruktur:

“Kalau evaluasi formal yang resmi gitu memang nggak ada. Jadi biasanya kalau ada masalah di lapangan baru ditindaklanjuti, contohnya waktu kemarin atap posyandu miring dan pas ada angin kenceng beberapa genteng sampai lepas. Nah, kejadian itu langsung saya sampaikan ke pekerja biar segera dibenerin. Selain itu juga saya ingatkan supaya bisa jadi acuan dan lebih diperhatikan lagi di proyek-proyek berikutnya.” (Wawancara, 10 Agustus 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa evaluasi bersifat reaktif, hanya muncul ketika ada masalah teknis. Selain itu, evaluasi dilakukan dalam lingkup terbatas antara perangkat desa, sehingga pengetahuan dan pembelajaran yang dihasilkan tidak maksimal menyebar ke masyarakat penerima program. Dalam upaya pemberdayaan, cara seperti ini membatasi penyebaran keterampilan dan pengetahuan yang sebenarnya bisa dimiliki lebih banyak orang di desa (Jepinus, 2024).

Melihat fakta lapangan tersebut, Jika dikaitkan dengan teori Budiani (2018), kondisi ini menunjukkan bahwa indikator pemantauan dan evaluasi belum sepenuhnya terpenuhi. Seharusnya, evaluasi menjadi sarana partisipatif yang tidak hanya memastikan keberhasilan teknis, tetapi juga mendorong keberlanjutan manfaat sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pelibatan warga dalam proses evaluasi memungkinkan mereka ikut menilai hasil, memahami kendala, dan berkontribusi dalam merumuskan solusi untuk program selanjutnya.

Implikasi dari praktik yang masih terbatas ini adalah penyebaran manfaat pengetahuan menjadi rendah. Warga yang tidak terlibat dalam evaluasi tidak memahami proses maupun hasil program, sehingga peluang untuk mengembangkan kapasitas mandiri menjadi terbatas. Program pun cenderung menghasilkan manfaat jangka pendek tanpa efek pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menerapkan evaluasi partisipatif sebagai bagian dari siklus PKTD, misalnya melalui forum musyawarah desa pascapelaksanaan yang terbuka untuk masyarakat. Selain itu, pendampingan teknis dari pemerintah daerah dapat membantu perangkat desa dalam menyusun indikator evaluasi yang menilai aspek teknis sekaligus keberlanjutan sosial dan peningkatan kapasitas warga.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Feri (2024) dalam studinya tentang efektivitas program padat karya di Desa Ulubalang, Kabupaten Bone. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemantauan lebih difokuskan pada aspek teknis pembangunan dan kelengkapan administratif, sementara aspek pembelajaran partisipatif belum optimal. Kesamaan pola ini juga terlihat di Desa Dukuhsari, di mana pemantauan masih terbatas pada pencatatan absensi, dokumentasi, dan penyusunan SPJ tanpa evaluasi terbuka yang melibatkan masyarakat secara luas.(Feri, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya capaian dan keterbatasan. Dari indikator ketepatan sasaran, perekrutan tenaga kerja telah melibatkan keluarga rentan, namun masih dilakukan secara informal tanpa mekanisme verifikasi yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan bias kedekatan dan belum mencerminkan pemerataan sepenuhnya. Indikator sosialisasi program dinilai cukup efektif karena dilaksanakan melalui forum formal desa seperti Musrenbang dan rapat RT/RW, sehingga warga memperoleh pemahaman yang memadai tentang tujuan dan mekanisme PKTD. Pada indikator kesesuaian tujuan, capaian jangka pendek terlihat dari tambahan penghasilan warga dan perputaran ekonomi lokal, tetapi tujuan jangka panjang berupa peningkatan kapasitas kerja dan kemandirian belum tercapai akibat ketiadaan pelatihan atau pendampingan pascaprogram. Sementara itu, indikator pemantauan dan evaluasi telah berjalan melalui peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tetapi masih fokus pada aspek teknis dan administratif, dan evaluasi pascaprojek masih terbatas di lingkup perangkat desa.

Secara umum PKTD berperan dalam mendorong ekonomi lokal, tetapi masih lemah dalam pemberdayaan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperbaiki mekanisme seleksi peserta berbasis data kemiskinan, merancang pelatihan bagi warga non-tukang, serta mengembangkan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat. Penelitian ini terbatas pada satu desa dan sebagian besar data berasal dari wawancara perangkat desa dan warga. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi dan membandingkan implementasi PKTD di desa lain agar efektivitasnya dapat dinilai secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, K. N. P. E. S. K. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Budiasa, A. G. R., Raka, A. A. G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 71–82. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>
- Endi, U., & Widhiasthini, N. W. (2021). *Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dirumuskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan nasional salah*. 5, 148–161.

- Feri. (2024). *EFEKTIVITAS PROGRAM PADAT KARYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA ULUBALANG KABUPATEN BONE*. February, 4–6.
- Haryono, D., Silviana, E., & Nuraisyah, N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padatkarya Tunai Desa (Pktd) Dari Dana Desa Di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 4(2), 87–94. <https://doi.org/10.55100/administrator.v4i2.50>
- Jazuli, C. C. (2021). Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 159.
- Jepinus, Y. F. (2024). PEMBERDAYAAN DAN INOVASI UNTUK KEMANDIRIAN DESA. *DIANMAS BHAKTI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 1–6. file:///C:/Users/hp 645 g1/Downloads/DIANMAS+BHAKTI+HAL+1-6.pdf
- Marhaeni, A. A. I. N., Sudibia, I. K., Andika, G., & Fahlevi, M. (2024). Impacts of Village Funding on Community Empowerment and Poverty in Klungkung, Bali. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(3), 981–990. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190316>
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>
- Onyeyirichi, O. A., & Deepika, M. G. (2025). Rural multidimensional poverty and livelihood mix: A micro level study in Bihar, India. *Heliyon*, 11(4), e42772. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42772>
- Permendesa. (2017). Permendesa Nomor 19 Tahun 2017. *Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*, 1–67.
- Prihatini, J., Pratama, D., & Wijaya, I. M. A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(5), 1405–1414. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1369>
- Setiawan, M. Y. A., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 665–680. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p665-680>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Viollaz, M. A. R. I. A. N. A., Winkler, H., Taamneh, M., Rawabdeh, M. A., Abu-Hummour, A. M., Sundari, S., Sidhva, D., Akash, R., Shalaby, M., Elimam, L., Salem, R., Şahin Mencütek, Z., Nashwan, A. J. J., Pell, T. L., Oxfam, Oran, A. F., Al-Assaf, G. I., Al-satel, R. A., Miedema, S. S., ... Santos Silva, M. (2020). Community effects of cash-for-work programmes in Jordan: Supporting social cohesion, more equitable gender roles and local economic development in contexts of flight and migration. In *Journal of Development Studies* (Vol. 22, Issue 2). <http://dx.doi.org/10.23661/s103.2020> <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/www.econstor.eu%0Ahttp://www.europeanjournalofsocialsciences.com/>